



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

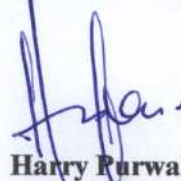
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kepada nusa dan bangsa.

Sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 7/K/I-XIII/12/2015, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020. Untuk mendukung pencapaian Renstra BPK, kami telah menyusun Laporan Kinerja yang merupakan hasil evaluasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur guna memberikan gambaran informasi pencapaian kinerja dari target kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Tahun 2018, dengan menetapkan 1 Sasaran Strategis, 7 Strategi, 4 Indikator Kinerja Utama dan 23 Indikator Kinerja.

Harapan kami, penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 dapat menjadi acuan dan pendorong dalam meningkatkan pencapaian kinerja tahunan maupun di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini jauh dari sempurna sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, masukan, dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

☞ Kepala Perwakilan



Harry Purwaka

NIP. 197009291990031001



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai BPK Perwakilan Jawa Timur.....	5
Tabel 1.2	Ketersediaan Jumlah Pemeriksa.....	5
Tabel 1.3	Pagu Anggaran dan Realisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	6
Tabel 2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	10
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	12
Tabel 3.2	Capaian IKU 1.1 2015-2018.....	14
Tabel 3.3	Target kinerja 5 tahunan IKU 1.1.....	14
Tabel 3.4	Capaian IKU 1.2 2015-2018.....	15
Tabel 3.5	Target kinerja 5 tahunan IKU 1.2.....	16
Tabel 3.6	Capaian IKU 1.3 2015-2018.....	16
Tabel 3.7	Target kinerja 5 tahunan IKU 1.3.....	16
Tabel 3.8	Capaian IKU 1.4 2015-2018.....	17
Tabel 3.9	Target kinerja 5 tahunan IKU 1.4.....	17
Tabel 3.10	Capaian IK 1.1.1 2015-2018.....	19
Tabel 3.11	Target kinerja 5 tahunan IK 1.1.1.....	19
Tabel 3.12	Capaian IK 1.1.2 2015-2018.....	20
Tabel 3.13	Target kinerja 5 tahunan IK 1.1.2.....	20
Tabel 3.14	Capaian IK 1.1.3 2015-2018.....	21
Tabel 3.15	Target kinerja 5 tahunan IK 1.1.3.....	21
Tabel 3.16	Capaian IK 1.2.1 2015-2018.....	22
Tabel 3.17	Target kinerja 5 tahunan IKU 1.2.1.....	22
Tabel 3.18	Capaian IK 1.2.2 2015-2018.....	22
Tabel 3.19	Target kinerja 5 tahunan IK 1.2.2.....	23
Tabel 3.20	Capaian IK 1.2.3 2015-2018.....	23
Tabel 3.21	Target kinerja 5 tahunan IK 1.2.3.....	23
Tabel 3.22	Capaian IK 2.1.1 2015-2018.....	24
Tabel 3.23	Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.1.....	24
Tabel 3.24	Capaian IK 2.1.2 2015-2018.....	25
Tabel 3.25	Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.2.....	25
Tabel 3.26	Capaian IK 2.1.3 2015-2018.....	25
Tabel 3.27	Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.3.....	26
Tabel 3.28	Capaian IK 2.1.4 2015-2018.....	26
Tabel 3.29	Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.4.....	27
Tabel 3.30	Capaian IK 3.1.1 2015-2018.....	27
Tabel 3.31	Target kinerja 5 tahunan IK 3.1.1.....	28
Tabel 3.32	Capaian IK 3.1.2 2015-2018.....	28

Tabel	3.33	Target kinerja 5 tahunan IK 3.1.2.....	29
Tabel	3.34	Capaian IK 3.1.3 2015-2018.....	29
Tabel	3.35	Target kinerja 5 tahunan IK 3.1.3.....	30
Tabel	3.36	Capaian IK 3.2.1 2015-2018.....	30
Tabel	3.37	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.1.....	31
Tabel	3.38	Capaian IK 3.2.2 2015-2018.....	31
Tabel	3.39	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.2.....	31
Tabel	3.40	Capaian IK 3.2.3 2015-2018.....	32
Tabel	3.41	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.3.....	32
Tabel	3.42	Capaian IK 3.2.4 2015-2018.....	33
Tabel	3.43	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.4.....	33
Tabel	3.44	Capaian IK 3.2.5 2015-2018.....	33
Tabel	3.45	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.5.....	34
Tabel	3.46	Capaian IK 3.2.6 2015-2018.....	35
Tabel	3.47	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.6.....	36
Tabel	3.48	Capaian IK 3.2.7 2015-2018.....	37
Tabel	3.49	Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.7.....	37
Tabel	3.50	Capaian IK 3.3.1 2015-2018.....	37
Tabel	3.51	Target kinerja 5 tahunan IK 3.3.1.....	38
Tabel	3.52	Capaian IK 3.3.2 2015-2018.....	38
Tabel	3.53	Target kinerja 5 tahunan IK 3.3.2.....	39
Tabel	3.54	Capaian IK 3.4.1 2015-2018.....	39
Tabel	3.55	Target kinerja 5 tahunan IK 3.4.1.....	39
Tabel	3.56	Rencana dan Realisasi Kegiatan Perwakilan.....	41
Tabel	3.57	Kegiatan Pemeriksaan/ Pemantauan.....	41
Tabel	4	Nilai IKU Tahunan.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	3
Gambar	2.1	Peta Strategis Eselon 1 AKN V.....	7
Gambar	2.2	Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	8
Gambar	3.1	Pemberian Keterangan Ahli Arif Praseno di Pengadilan Tipikor PN Surabaya.....	16
Gambar	3.2	Konferensi Pers Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur.....	17
Gambar	3.3	Foto Bersama dalam Kegiatan Coffe Morning.....	34

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Merumuskan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
4. Menyusun program, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Menetapkan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
6. Memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
7. Mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
8. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

9. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Melakukan pembahasan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
12. Menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
13. Menyiapkan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
14. Menyiapkan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
15. Melakukan Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
16. Memutakhirkan data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
17. Menyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
18. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Struktur Organisasi diatas sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/09/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara V yang terdiri dari:

1. SubAuditorat Jawa Timur I;

SubAuditorat Jawa Timur I bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Lamongan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

2. SubAuditorat Jawa Timur II;

SubAuditorat Jawa Timur II bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang,

Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

3. SubAuditorat Jawa Timur III;

SubAuditorat Jawa Timur III bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

4. SubAuditorat Jawa Timur IV;

SubAuditorat Jawa Timur IV bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

5. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sekretariat Perwakilan terdiri dari enam Sub Bagian yaitu Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Keuangan, Subbagian SDM, Subbagian Hukum, Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Umum & Teknologi Informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan bertugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

c. Subbagian SDM

Subbagian SDM bertugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

d. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum bertugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

e. **Subbagian Hubungan Masyarakat**

Subbagian Hubungan Masyarakat bertugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan mengelola perpustakaan.

f. **Subbagian Umum dan Teknologi Informasi**

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi bertugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2018 2019 berjumlah 221 orang Pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai BPK Perwakilan Jawa Timur

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Perwakilan	1
2	Kepala Unit Pemeriksa	15
3	Pemeriksa	80
4	Pemeriksa Muda	105
5	Penilik	1
6	Verifikatur	18
7	Administrasi Umum	1
Jumlah		221

Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Perwakilan Jawa Timur adalah kurangnya jumlah pemeriksa. BPK Jawa Timur bertanggungjawab atas pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 39 *auditee* di seluruh Jawa Timur. Kebutuhan personil pemeriksa untuk satu LKPD sebanyak 4 orang kecuali untuk pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 orang dan Kota Surabaya sebanyak 6 orang. Dengan jumlah pemeriksa sebanyak 151 orang yaitu 4 orang Kepala Subauditorat, 4 orang Pengendali Teknis, 31 orang Ketua Tim, dan 116 Anggota Tim dalam lingkup pemeriksaan di Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, sehingga kondisi tersebut belum cukup ideal apabila dilaksanakan pemeriksaan secara serentak. Hal ini dapat kami jelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Ketersediaan jumlah pemeriksa

No	Sub Auditorat	Ketersediaan			Kebutuhan (39 Entitas)			Kurang/Lebih		
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim
1	Jatim I	1	7	30	2	9	36	1	2	6
2	Jatim II	1	9	32	3	11	33	2	2	1

No	Sub Auditorat	Ketersediaan			Kebutuhan (39 Entitas)			Kurang/Lebih		
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim
3	Jatim III	1	8	28	2	10	30	1	2	2
4	Jatim IV	1	7	26	2	9	29	1	2	3
	Total	4	31	116	9	39	128	5	8	12

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengatasi hal tersebut dengan menggunakan bantuan tenaga dari unit kerja penunjang dan menggunakan tenaga KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK

2. Anggaran

Pagu Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2018 yaitu 49.658.099.000, naik sebesar Rp3.913.448.000,00 dari Pagu Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp45.744.651.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.227.263.163,00 atau sebesar 96,68% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pagu Anggaran dan Realisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

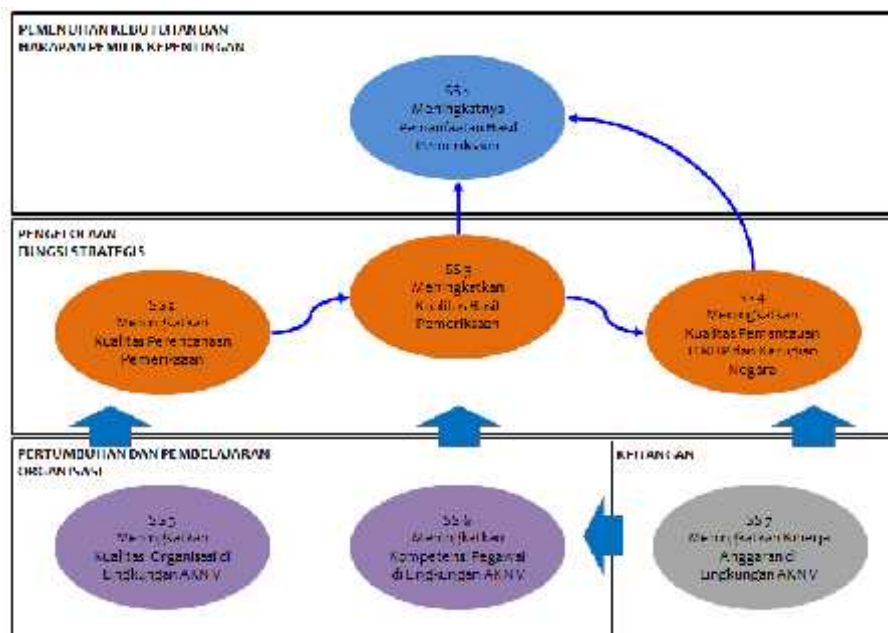
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	JUMLAH REALISASI	49.658.099.000	47.592.811.386	95,85
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	49.658.099.000	47.592.811.386	95,85
08. 1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	49.658.099.000	47.592.811.386	95,85
085	Rumusan Bahan Pendapat	8.284.000	8.198.300	98,97
086	Layanan Administrasi Pemeriksaan	1.521.059.000	1.485.348.811	97,73
088	Sumbangan IHPS	317.256.000	316.931.819	99,90
091	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	2.521.165.000	2.486.786.032	99,73
116	LHP BPK Perwakilan Prov.Jatim	19.770.903.000	19.386.863.128	98,77
156	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jatim	893.288.000	882.130.565	98,75
174	Laporan Profil Entitas	11.140.000	11.125.025	99,86
182	Layanan Sekretariat Perwakilan	3.526.592.000	3.458.246.911	98,24
994	Layanan Perkantoran	21.088.412.000	19.381.726.263	91,93

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Jawa Timur

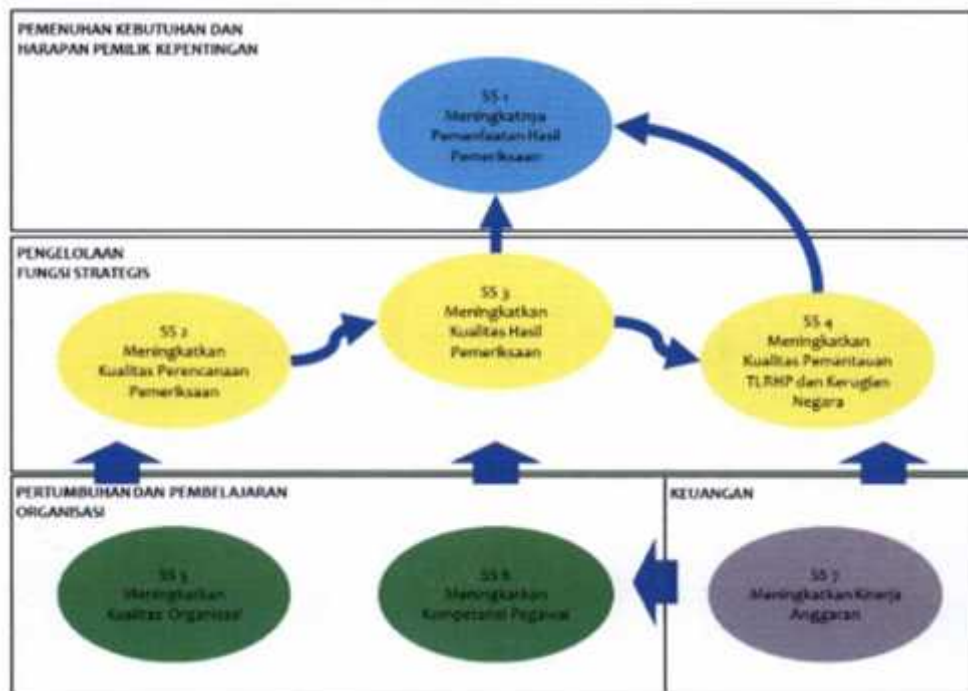
Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020 telah ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015. Perencanaan strategis ini memuat visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, AKN V menetapkan sebelas sasaran strategis (SS). Sebelas (11) sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide dan dijabarkan menjadi tujuh (7) Sasaran Strategis dalam bentuk peta strategis terlihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Strategis Eselon I AKN V



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V yang digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terlihat dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur



Berikut adalah visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis BPK Perwakilan Jawa Timur :

1. **Visi**

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

2. **Misi**

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. **Nilai Dasar**

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berpegang teguh pada nilai dasar antara lain :

a. **Integritas**

Mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan independensi;

b. **Independensi**

Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (*independent in fact*) dan independensi dalam penampilan perilaku (*independent in appearance*) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Bersikap independen berarti menghindari hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang diperiksa;

c. **Profesionalisme**

Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan.

4. **Tujuan Strategis**

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Selain visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ikut serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V dengan menetapkan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
 3. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli;
 4. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang; dan
- 23 Indikator Kinerja (IK), antara lain sebagai berikut :
1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan;
 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP;
 3. Tingkat Evaluasi LHP;
 4. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 5. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
 6. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang;
 7. Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan;
 8. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK;
 9. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
 10. Persentase gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK;
 11. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK
 12. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
 13. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin;
 14. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja;
 15. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
 16. Jumlah Best Practice yang disusun;
 17. Tingkat Penerapan Best Practice;
 18. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja;
 19. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
 20. Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan;
 21. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa;
 22. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa);
 23. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran;

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) beserta target pencapaian IKU Tahun 2018 yang dituangkan dalam PKPK yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2018. Sasaran Strategis, Strategi, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja Utama		Target 2018
SASARAN Meningkatnya Pemeriksaan	STRATEGIS Pemanfaatan	I Hasil	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%
			IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
			IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
			IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan			IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
			IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%
			IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara			IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
			IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78
			IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan			IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
			IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
			IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
			IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan			IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0
			IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
			IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan			IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja	A
			IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
			IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1
			IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2018
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, sesuai perhitungan aplikasi prisma BPK adalah sebesar 97,92%. Berikut adalah pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018.

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2018		Skor
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	72,63%	103,75
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101,00
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	105,00
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	20%	100,00
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	105,00
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	100,00
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,42	105,00
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2018		Skor
	IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	3,94	78,8
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,57	91,4
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,01%	105
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1	1	100,00
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100,00
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	100,00
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	6,5	105,00
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100,00
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100,00
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	73,78%	86,80

Secara umum, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di tahun 2018 telah mencapai target Kinerja yang termuat dalam Rencana Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja, antara lain :

1. IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK
2. IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK,
3. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, dan
4. IK 3.4.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diukur melalui 4 Indikator Utama, sebagai berikut :

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Berikut tabel pencapaian IKU 1.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IKU 1.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.2 Capaian IKU 1.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2018	Capaian				
		2018	2017	2016	2015	
1	2	3	4	5	6	
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.1	1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	72,63%	70,97%	66,12%	75,14%

Tabel 3.3 Target kinerja 5 tahunan IKU 1.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.1	1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	61%	62%	63%	64%	72,63%	113,48%

Pada tahun 2018, persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh *auditee* terealisasi sebesar 72,63% dari target 70% dan mendapatkan skor 103,75. Realisasi IKU 1.1 naik jika dibandingkan realisasi dua tahun terakhir di tahun 2016 dan tahun 2017.

Pencapaian IKU 1.1 di tahun 2018 telah memenuhi target pencapaian IKU tahun 2020 seperti yang termuat dalam RIR BPK, yaitu sebesar 64%.

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong peningkatan Persentase Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan mengadakan kegiatan pembahasan tindak lanjut, membuka komunikasi dengan *auditee* dan DPRD untuk memberikan penjelasan dan masukan terkait penyelesaian rekomendasi BPK dan ikut mensukseskan penerapan SIPTL di wilayah Provinsi Jawa Timur. Komunikasi kepada auditee sebelum kegiatan pembahasan juga dilaksanakan agar bukti penyelesaian tindak lanjut segera dipenuhi sebelum kegiatan pembahasan untuk mengoptimalkan pencapaian penyelesaian tindak lanjut di wilayah Jawa Timur.

Hambatan peningkatan penyelesaian tindak lanjut di tahun 2018 adalah aplikasi SIPTL yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penyelesaian tindak lanjut secara *real time* di Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum dimanfaatkan dengan optimal.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Pemantauan Tindak lanjut untuk 39 entitas pemeriksaan pada Semester I dan II 2018. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sebesar Rp417.324.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp411.168.555,00 atau sebesar 98,53% dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dianggarkan sebesar Rp97.258.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.641.829,00 atau sebesar 96,28% dengan pencapaian output/keluaran sebanyak 78.

2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi pada tahun berjalan untuk dianalisa dan disampaikan ke IPH oleh Auditorat Utama Investigasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti. Berikut tabel pencapaian IKU 1.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IKU 1.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.4 Capaian IKU 1.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.2	1.2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel.3.5 Target kinerja 5 tahunan IKU 1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.2	1.2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

Pada tahun 2018, persentase Penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH mendapatkan skor 100. Realisasi IKU 1.2 tetap selama 3 tahun terakhir.

Kegiatan Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH merupakan bagian dari Layanan Hukum Perwakilan dengan anggaran Rp541.350.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp524.919.706,00 atau sebesar 96,96%.

3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

IKU 1.3 merupakan gabungan dari dua IKU tahun 2017, yaitu IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli.

Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara.

Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK.

Berikut tabel pencapaian IKU 1.3 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IKU 1.3 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.6. Capaian IKU 1.3 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.3	1.3. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	100%	101%	
	1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara			100%	101%	
	1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli			100%	103%	

Tabel.3.7. Target kinerja 5 tahunan IKU 1.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.3	1.3. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
	1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
	1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

Pada tahun 2018 terdapat satu permintaan perhitungan kerugian negara yang memenuhi syarat untuk diterima. Pada triwulan I tahun 2018, BPK Perwakilan Jawa Timur menerima permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Batu, kemudian Anggota BPK yang menaungi Auditorat Utama Investigasi menerbitkan surat tugas pemeriksaan investigatif atas kegiatan penyebaran Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bagian Humas Setda Batu, dan pada tanggal 22 Februari 2018, Pemeriksa Subauditorat Jatim III memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya. IKU 1.3 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dan mendapatkan skor 100.

Kegiatan Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli merupakan bagian dari Layanan Hukum Perwakilan dengan anggaran Rp541.350.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp524.919.706,00 atau sebesar 96,96%.

Gambar 3.1 Pemberian Keterangan Ahli Arif Praseno di Pengadilan Tipikor PN Surabaya



4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

IKU 1.4 ditahun sebelumnya merupakan IKU 1.6. IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat Keuangan Negara (AKN) terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Berikut tabel pencapaian IKU 1.4 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IKU 1.4 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.8 Capaian IKU 1.5 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.4	1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	1

Tabel.3.9 Target kinerja 5 tahunan IKU 1.5

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.4	1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	1	100%

Pada tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyumbangkan satu Bahan Pendapat ke dalam data base Ditama Revbang dengan judul, Efektivitas Pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada Pemerintah Kota Batu. IKU 1.4 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dan mendapatkan skor 100. Realisasi IKU 1.2 stabil selama 3 tahun terakhir.

BPK Jawa Timur terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui penyusunan usulan bahan pendapat ke Ditama Revbang sebagai data base Bahan Pendapat BPK.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan dengan target output/ keluaran satu rumusan bahan pendapat dan telah terealisasi sebesar satu bahan pendapat, dengan anggaran sebesar Rp8.284.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.198.300,00 atau sebesar 98,96%.

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan strategis untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan itu, Perwakilan memiliki tiga bentuk pengukuran sebagai berikut :

1. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan.

Indikator Kinerja 1.1.1 merupakan pengembangan dari Indikator Kinerja tahun sebelumnya, yaitu Indikator Kinerja Utama 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan

Pelaksanaan Pemeriksan. IK 1.1.1 menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. Penetapan Indikator Kinerja 1.1.1 bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. Komponen yang digunakan untuk menilai IKU ini diantaranya kesesuaian antara RKP dan Renstra, dan kesesuaian antara AO dan TSAO.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 1.1.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 1.1.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.10 Capaian IK 1.1.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%				
	2.1. Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan			95%	95%	

Tabel 3.11 Target kinerja 5 tahunan IK 1.1.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan			90%		90%	90%	100,00%
	2.1. Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	90%	95%	100%		0,00%

IK 1.1.1 merupakan Indikator Kinerja yang baru ditetapkan di 2018. Indikator Kinerja ini dinilai oleh Direktorat EPP. Pada Tahun 2018 IK 1.1.1 terealisasi sebesar 90% dari target 90% dan mendapatkan skor 100.

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong pemenuhan tingkat implementasi strategi pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan, salah satunya melalui kegiatan penyusunan dan pembahasan prognosis Rencana Kegiatan Pemeriksaan.

2. **IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP.**

IKU 1.1.2 menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja, selain itu dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 1.1.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 1.1.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.12 Capaian IK 1.1.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
IK 1.1.2	2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	20%	21,05%	22,39%	

Tabel 3.13 Target kinerja 5 tahunan IK 1.1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.2	2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	15%	17%	20%	23%	25%	20%	80,00%

Untuk tahun 2018, IK 1.1.2. ditargetkan sebesar 20% dan telah terealisasi 100%. Dari 13 Pemeriksaan Kinerja yang direncanakan, telah dilaksanakan dan diserahkan 13 LHP Kinerja kepada DPRD pada tanggal 21 Desember 2018. Dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2016, proporsi pemeriksaan kinerja yang ditetapkan oleh BPK untuk Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, namun telah memenuhi target pencapaian IKU tahun 2018 walaupun belum dapat mencapai target Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP di tahun 2020.

Pada tahun 2018, anggaran Pemeriksaan Kinerja sebesar Rp4.574.201.728,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.464.640.999,00 atau sebesar 97,60% dengan pencapaian output/ keluaran sebanyak 13 LHP Kinerja sesuai anggaran.

3. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Indikator Kinerja 1.1.3 merupakan pengembangan dari Indikator 3.3 Tingkat Konsistensi dan akurasi penyajian LHP. IKU ini menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan. Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi LHP atas kesesuaian simpulan dengan TSAO.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 1.1.3 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 1.1.3 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.14 Capaian IK 1.1.3 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%				
	3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP				76%	

Tabel 3.15 Target kinerja 5 tahunan IK 1.1.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP			90%		90%	90%	100,00%
	3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%		0,00%

IK 1.1.3 merupakan Indikator Kinerja yang baru ditetapkan di 2018. Indikator Kinerja ini dinilai oleh Direktorat EPP. Pada Tahun 2018 IK 1.1.3 terealisasi sebesar 80% dari target 80% dan mendapatkan skor 100.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Layanan Administrasi pemeriksaan yang dianggarkan sebesar Rp707.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp694.402.363,00 atau sebesar 98,96%. IK 1.1.3 - Tingkat Evaluasi LHP merupakan bagian dari Layanan Administrasi Pemeriksaan pada Perwakilan yang mempunyai target output 12 laporan dan telah terealisasi sebanyak 12 laporan.

Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sebagai upaya ikut serta dalam mendorong efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa upaya, salah satunya mengadakan kegiatan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Dalam meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian Negara/Daerah, BPK Perwakilan Jawa Timur memiliki tiga bentuk pengukuran sebagai berikut :

1. IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK 1.2.1 menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 1.2.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 1.2.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.16 Capaian IK 1.2.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
IK 1.2.1	4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3.17 Target kinerja 5 tahunan IK 1.2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
IK 1.2.1	4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Untuk tahun 2018, IK 1.2.1 ditetapkan sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Kemutakhiran data tindak lanjut di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diupayakan dengan telah dilaksanakannya dua kegiatan Pembahasan Tindak lanjut, yaitu pada semester I 2018 (tanggal 3 s.d 7 Juli 2018) dan Semester II 2018 (tanggal 10 s.d 12 Desember 2018).

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong meningkatnya kemutakhiran data tindak lanjut, salah satunya melalui kegiatan pembahasan tindak lanjut dan juga workshop SIPTL kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Pemantauan Tindak lanjut untuk 39 entitas pemeriksaan pada Semester I dan II 2018. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sebesar Rp417.324.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp411.168.555,00 atau sebesar 98,53% sedangkan anggaran pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dianggarkan sebesar Rp97.258.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.641.829,00 atau sebesar 96,28% dengan pencapaian output/keluaran sebanyak 78 laporan.

2. **IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.**

Laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja Auditorat/ Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 1.2.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 1.2.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.18 Capaian IK 1.2.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
IK 1.2.2	4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	78	78	78

Tabel 3.19 Target kinerja 5 tahunan IK 1.2.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.2	4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	78	78	78	78	100,00%

Untuk tahun 2018, IK 1.2.2 telah terealisasi 100%. Dari target 78 Laporan Pemantauan Kerugian yang ditetapkan, telah diterbitkan 39 Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I 2018 pada 13 Juli 2018 dan 39 Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester II 2018 pada 7 Januari 2019.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Pemantauan Kerugian Daerah untuk 39 entitas pemeriksaan pada Semester I dan II 2018. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah - Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar Rp475.964.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp470.962.010 atau sebesar 98,95% dengan realisasi output sebanyak 78 laporan.

3. **IKU 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.**

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Direktorat EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD. Acuan ketepatan waktu adalah ND Kaditama Revbang kepada Satker tentang Batas Waktu Input SIKAD.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu. Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 1.2.3 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 1.2.3 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.20 Capaian IK 1.2.3 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
IK 1.2.3	4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.21 Target kinerja 5 tahunan IK 1.2.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.3	4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

IK 1.2.3 telah terealisasi 100% dengan telah disampaikannya 78 Laporan Pemantauan Penyelesaian Keuangan Daerah (PKD) ke Kepala Direktorat EPP sebanyak 39 Laporan pada semester I 2018 sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Perwakilan Jawa Timur Nomor 240/ND/XVIII.SBY/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan sebanyak 39 Laporan pada semester II sesuai Nota Dinas Kepala Perwakilan Jawa Timur Nomor 26/ND/XVIII.SBY/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Laporan dan mendapatkan skor 100. Dalam 3 tahun terakhir, pencapaian IK 1.2.3 stabil.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Pemantauan Pemantauan Kerugian Daerah untuk 39 entitas pemeriksaan pada Semester I dan II 2018. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah- Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar Rp475.964.000,00 dan terealisasi sebesar Rp470.962.010 atau sebesar 98,95% dengan output sebanyak 78 laporan.

Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kualitas Hasil Pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diukur melalui empat indikator sebagai berikut :

1. IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan.

Indikator Kinerja 2.1.1 merupakan gabungan dari Indikator Kinerja 3.1 dan 3.2 yang ditetapkan di 2017. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 2.1.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 2.1.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.22 Capaian IK 2.1.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan			100%	100%	
	3.2. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan			100%	100%	100%

Tabel. 3.23 Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%		
	3.2. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%		

Pemenuhan QA (Reviu PSP Kasub dan Kalan) dan QC (Reviu PFP Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Penanggungjawab) 2018 yaitu untuk 39 Pemeriksaan LKPD, 13 Pemeriksaan Kinerja dan 13 Pemeriksaan PDDT telah terealisasi sebesar 100%.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan sebesar Rp103.200.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp102.979.892,00 atau sebesar 99,78% dengan pencapaian output/keluaran sebanyak 12 Laporan sesuai anggaran.

2. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indikator tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa AKN dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

IK 2.1.2 bertujuan mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 2.1.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 2.1.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.24 Capaian IK 2.1.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 2.1.2	1.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,00	4,42	4,33	4,24	

Tabel 3.25 Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.2	1.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,42	111%

IK 2.1.2 diukur dengan menyebarkan Kuisisioner kepada 39 entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 13 Entitas Pemeriksaan Kinerja dan 13 Entitas Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu di wilayah Jawa Timur. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai 4,42 dari target nilai 4,1 dan mendapatkan skor 105.

Hambatan untuk pemenuhan Indikator 2.1.2 adalah penilaian tidak objektif dari auditee. Auditee yang kecewa dengan hasil pemeriksaan BPK, cenderung memberikan nilai jelek walaupun pemeriksa sudah menjalankan independensi, integritas dan profesionalisme.

3. IK 2.1.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian pemeriksaan yang dinyatakan dalam Program Pemeriksaan (P2).

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 2.1.3 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 2.1.3 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.26 Capaian IK 2.1.3 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 2.1.3	2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%		100%	97,17%	60,95%

Tabel. 3.27 Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.3	2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IKU 2.1.3 terealisasi 100% dengan skor 100. Sampai dengan 31 Desember 2018, BPK Perwakilan Jawa Timur telah menyerahkan 39 LHP LKPD, 13 LHP Kinerja dan 13 LHP

PDDT dengan tepat waktu. Dalam 2 tahun terakhir, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah berhasil konsisten menyampaikan LHP tepat waktu.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menganggarkan kegiatan Penyusunan LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp881.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp859.323.103,00 atau sebesar 97,51% dengan pencapaian output/keluaran sebanyak 99 LHP Keuangan sesuai anggaran.

4. IK 2.1.4. Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan.

IKU ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 2.1.4 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 2.1.4 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.28 Capaian IK 2.1.4 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%			

Tabel. 3.29 Target kinerja 5 tahunan IK 2.1.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran IK 2.1.4 baru ditetapkan di tahun 2018. Dalam Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK Tabel 6. Indikator Pengukuran SS 2 (Meningkatnya Kualitas SPM), pengukuran

gugatan atas LHP BPK didasarkan pada persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah ditetapkan sebesar 0% (2016 s.d 2020). Sampai dengan 31 Desember 2018 belum ada putusan pengadilan atas gugatan LHP BPK sehingga masih dianggap sebagai IKU Bonus dan mendapat skor 100.

Strategi 3.1. Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

1. IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.1.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.1.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.30 Capaian IK 3.1.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 3.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,94			

Tabel 3.31 Target kinerja 5 tahunan IK 3.1.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 3.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK			5,00		5,00	3,94	79%

Pengukuran IK 3.1.1 baru ditetapkan di 2018 dengan target 5,00 dan telah terealisasi 3,94 dengan skor 78,8.

Kesulitan atas pemenuhan IK 3.1.1 adalah kecenderungan *surveier* menganggap remeh dalam mengisi kuisioner, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Namun untuk memaksimalkan pencapaian target IK 3.1.1, BPK Perwakilan Jawa Timur merencanakan untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman visi misi BPK dengan mengundang nara sumber dari Inspektorat Utama.

2. IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.1.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.1.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.32 Capaian IK 3.1.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 3.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,57			

Tabel 3.33 Target kinerja 5 tahunan IK 3.1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 3.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK			5,00		5,00	4,57	91%

Pengukuran IK 3.1.2 baru ditetapkan di 2018 dengan target sebesar 5,00 dan telah terealisasi sebesar 4,57 dengan skor 91,4.

Sama seperti IK 3.1.1, kesulitan atas pemenuhan IK 3.1.2 adalah kecenderungan *surveier* menganggap remeh dalam mengisi kuisioner, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Namun untuk memaksimalkan pencapaian target IK 3.1.2, BPK Perwakilan Jawa Timur merencanakan untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugas pokok pegawai di lingkungan BPK Jawa Timur.

3. IK 3.1.3. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode etik dan Peraturan Disiplin

Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.1.3 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.1.3 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.34 Capaian IK 3.1.3 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategis 3.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%			

Tabel 3.35 Target kinerja 5 tahunan IK 3.1.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategis 3.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin			100%		100%	100%	100%

Pengukuran IK 3.1.3 baru ditetapkan di 2018 dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2018 BPK Perwakilan Jawa Timur memperoleh skor 100.

Strategi 3.2. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Dalam upaya meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan AKN, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki tujuh bentuk pengukuran sebagai berikut:

1. **IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Timur.**

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Perwakilan) merupakan evaluasi yang dilaksanakan

oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.36 Capaian IK 3.2.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.1	5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB	A	A	A

Tabel 3.37 Target kinerja 5 tahunan IKU 3.2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.1	5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	A	A	100%

Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2017 sesuai Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 295/ND/XI/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai 79,77(BB) dengan kategori sangat baik. Realisasi IK 3.2.1 turun jika dibandingkan pencapaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja selama 3 tahun terakhir, dan belum mencapai target yang ditetapkan di 2020.

BPK Jawa Timur terus berupaya memperbaiki rekomendasi-rekomendasi Itama dalam hasil evaluasi SIMAK.

2. **IKU 3.2.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.**

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email, eDrive*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.38 Capaian IK 3.2.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.2	5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,01%	74,54%	90,74%	

Tabel 3.39 Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.2	5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	85%	90%	95%	100%	98,01%	98,01%

Penilaian pemanfaatan teknologi informasi dibagi menjadi tiga dengan proporsi sebagai berikut:

1. 35% layanan dasar yang terdiri dari email (20%), *e drive* (10)% dan portal (5%)
2. 30% SISDM
3. 35% layanan pemeriksaan, yang terdiri dari pemanfaatan SMP (15%), e audit (15%) dan SIPTL (5%)

Pada tahun 2018, IKU 3.2.2 terealisasi 98,01% dari target 80% dan mendapatkan skor 105.

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong pemanfaatan Tehnologi Informasi yaitu dengan menerbitkan surat edaran pemanfaatan TI maupun himbauan secara lisan pada saat pengarahan dan rapat-rapat koordinasi.

Hambatan dalam mendorong pemanfaatan TI adalah adanya aplikasi/ sistem yang tidak *user friendly* sehingga minat pegawai yang kurang dalam memanfaatkan layanan TIK BPK.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menganggarkan kegiatan mengelola teknologi informasi sebesar Rp37.896.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.277.061,00 atau sebesar 93,08%.

3. IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang disusun.

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best practice*. IK ini mengukur tingkat penyusunan jumlah best practices yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.3 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.3 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.40 Capaian IK 3.2.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1,00	1,00			
	5.3.Persentase Penyusunan Best-Practice			1,00	0,00	

Tabel. 3.41 Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	0	1	1	1	1	1	100%
	5.3.Persentase Penyusunan Best-Practice	0	60%	70%	85%	100%	100%	100%

IK 3.2.3 telah terealisasi di triwulan III 2018 dengan diajukannya Best Practice Penggunaan Instruksi Kerja dan Aplikasi Layanan Informasi Publik dalam meningkatkan layanan informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melalui Nota Dinas Nomor 340/ND/XVIII.SBY/09/2018 tanggal 20 September 2018 dan disetujui tanggal 27 September 2018. Untuk tahun 2018, IK 3.2.3 ditetapkan sebanyak satu dan telah terealisasi 100%.

Sejak ditargetkan di tahun 2017, BPK Perwakilan Jawa Timur telah konsisten mengusulkan best practice.

4. **IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*.**

Best practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah *best practice* yang akan disebar untuk pegawai.

IK ini mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.4 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.4 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.42 Capaian IK 3.2.4 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%			
	5.4. Persentase Penyebaran Best-Practice			0	0	0

Tabel 3.43 Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	0%	60%	70%	85%	100%	100%	100%
	5.4. Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	60%	70%	85%	100%	100%	100%

Untuk tahun 2018, IK 3.2.4 ditetapkan sebesar 100% dan telah terealisasi 100%.

BPK Jawa Timur terus berupaya memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lingkungan BPK dengan menyusun best practice di setiap tahun, sejak ditetapkan pada tahun 2017.

5. **IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Perwakilan.**

IK 3.2.5 merupakan gabungan dari IKU 5.5 dan Iku 5.6 tahun 2017. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 286/2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni 1 bulan setelah tahun pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni 1 bulan setelah triwulan pengukuran berakhir.

Ketepatan waktu penyampaian laporan output adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan berikutnya. IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan output secara tepat waktu.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.5 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.5 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.44 Capaian IK 3.2.5 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%			
	5.5. Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan			100%	100%	
	5.6. Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan			100%	100%	

Tabel 3.45 Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5. Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6. Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Output Kinerja terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Kinerja (Triwulan). Selama tahun 2018, BPK Perwakilan Jawa Timur selalu menyampaikan Laporan Output dan Kinerja Perwakilan tepat waktu, konsisten sejak 3 tahun terakhir.

6. **IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana.**

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai panduan standar sarana dan prasarana kerja BPK. Dalam menetapkan standar sarana dan prasarana, BPK masih berpedoman pada SK Sekjen No 299/K/X-XII.2/8/2009.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.6 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.6 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.46 Capaian IK 3.2.6 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.6	5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	89,89%	89,89%

Tabel 3.47 Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.6

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.6	5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	89%	89%	89%	89%	89%	90%	101%

Pada tahun 2018, IKU 3.2.6 telah mencapai target pemenuhan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 90% dan mendapatkan skor 100. Pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 90% konsisten sejak tahun 2017.

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong pemenuhan sarana dan prasarana dengan optimal.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan Kegiatan Pengurusan Sarana dan Prasarana melalui Layanan Umum Perwakilan sebesar Rp336.108.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp317.574.964,00 atau sebesar 94,48%

7. **IKU 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang dilaksanakan.**

Gambar 3.2. Konferensi Pers Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur



Gambar 3.3. Foto Bersama dalam Kegiatan Coffe Morning



Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk :

a. Media workshop

- Acara khusus yang dibuat untuk memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK melalui sebuah pertemuan tatap muka kepada wartawan sehingga nantinya diharapkan, wartawan yang diundang akan menyampaikan kembali informasi yang dimaksud kepada masyarakat luas melalui mediana masing-masing.

- Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan
 - Pelatihan (workshop) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb;
- b. Siaran Pers, Konferensi Pers ;
- Kegiatan yang dilakukan dengan mempersiapkan dan mengeluarkan siaran pers, yang berisi pengumuman, pernyataan sikap, penjelasan ataupun klarifikasi terhadap pemberitaan yang disebar dengan waktu yang tepat kepada media massa.
 - Konferensi pers merupakan acara khusus yang dibuat untuk menyampaikan keterangan informasi ataupun pernyataan oleh organisasi atau individu melalui sebuah pertemuan tatap muka kepada wartawan yang diharapkan kemudian akan menyampaikan kembali informasi yang dimaksud kepada masyarakat luas melalui medianya masing-masing
- c. Media visit, *pers lunch/coffe morning* dan wawancara;
- Media visit merupakan aktiivitas komunikasi yang dilakukan untuk menjalin pengertian dan hubungan yang baik dengan media massa dalam mencapai publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang
 - *Press lunch/coffe morning* merupakan makan siang/pagi bersama media dalam menjalin hubungan baik dengan pihak media;
 - Wawancara merupakan kegiatan memfasilitasi wawancara/talkshow media dengan narasumber BPK

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.2.7 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.2.7 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.48 Capaian IK 3.2.7 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.2.7	5.7. Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3,00	6,50	4,7	4,2	3,9

Tabel 3.49 Target kinerja 5 tahunan IK 3.2.7

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.7	5.7. Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	6,50	325%

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tiga kegiatan konferensi pers, empat kegiatan siaran pers, dan dua kegiatan media visit. IK 3.2.7 terealisasi sebesar 6,5 dari target nilai 3 dan mendapatkan skor 105. Dalam 3 tahun pencapaian IK 3.2.7 terus meningkat seiring dengan upaya Perwakilan Jawa Timur menjalin kerjasama dengan stake holder khususnya media massa.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan perwakilan, BPK Provinsi Jawa Timur memiliki dua bentuk pengukuran yaitu:

1. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa.

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.3.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.3.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.50 Capaian IK 3.3.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.3.1	6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	92,21%	83,33%	82,76%

Tabel 3.51 Target kinerja 5 tahunan IK 3.3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk tahun 2018, IK 3.3.1 ditetapkan sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Dari 147 Pemeriksa di Perwakilan Jatim, seluruhnya telah mengikuti diklat minimal selama 40 jam selama tahun 2018.

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong Pencapaian Persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa minimal 40 jam setahun dengan menyelenenggarakan diklat di Perwakilan serta melaksanakan in house training.

2. IKU 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Berikut tabel pencapaian IKU 6.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IKU 6.2 tahun 2017 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.3.2 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.3.2 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.52 Capaian IK 3.3.2 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1		2	3	4	5	6
Strategi 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.3.2	6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	90,54%	95,45%	84,85%

Tabel 3.53 Target kinerja 5 tahunan IK 3.3.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
Strategi 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90%	90%	90%	90%	90%	100%	111%

IK 3.3.2 telah terelaisasi sebesar 100% dengan skor 100. Dari 72 pegawai, semuanya telah mengikuti diklat minimal selama 20 jam selama tahun 2018. Sejak 3 tahun terakhir, baru di tahun 2018 IK 3.3.2 dapat mencapai target yg telah ditetapkan.

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Tingkat kinerja atas aspek implementasi anggaran berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari empat indikator, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berikut tabel pencapaian Indikator Kinerja 3.4.1 selama tiga (3) tahun terakhir dan tabel capaian IK 3.4.1 tahun 2018 dibanding target Pencapaian IKU lima (5) tahunan dalam lampiran Keputusan Sekjen BPK RI No.375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Rencana Implementasi Renstra BPK.

Tabel 3.54 Capaian IK 3.4.1 2015-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2018	Capaian				
		2018	2017	2016	2015	
1	2	3	4	5	6	
Stratigi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan						
IK 3.4.1	7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	85%	7,34%	86,18%	93,54%	

Tabel 3.55 Target kinerja 5 tahunan IK 3.4.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Stratigi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.4.1	7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	83%	85%	87%	90%	73,78%	81,98%

Pada tahun 2018 IK 3.1.4 terealisasi sebesar 73,78% dari target sebesar 85% dan mendapatkan skor 80.

BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong peningkatan tingkat kinerja implementasi anggaran terutama dengan menjaga aspek konsistensi Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari s.d Desember.

Hambatan yang dialami perwakilan Jawa Timur adalah kebutuhan penyerapan anggaran yang lebih besar dibandingkan anggaran yang direncanakan.

B. REALISASI ANGGARAN

1 RKP

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merencanakan 39 pemeriksaan Laporan Keuangan, 13 pemeriksaan kinerja dan 51 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (13 DTT, 38 Banpol). Kegiatan Pemantauan Kerugian dan Tindaklanjut untuk 39 entitas pemeriksaan pada Semester I dan II 2018. Selain itu, rencana Kegiatan yang menjadi bagian dari RKP yaitu: Rumusan Bahan Pendapat, Layanan Administrasi Pemeriksaan, Sumbangan IHPS, dan Laporan Profil Entitas. Rencana dan realisasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan/ Pemantauan s.d. Desember 2018	Keterangan
Pemeriksaan				
1	LK	35	35	Semester I

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan/ Pemantauan s.d. Desember 2018	Keterangan
Pemeriksaan				
2	LK (LHP Oleh KAP untuk dan atas nama BPK)	4	4	Semester I
3	Kinerja	13	13	Semester II
4	PDTT Banpol dan Non Banpol	51	51	Semester I dan Semester II
	Jumlah (1+2+3+4)	103	103	
Non Pemeriksaan				
5	Pemantauan Kerugian Daerah	78	78	Semester I dan Semester II
6	Pemantauan Tindak Lanjut	78	78	Semester I dan Semester II
7	Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Semester I dan Semester II
8	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Semester I dan Semester II
9	Sumbangan IHPS	2	2	Semester I dan Semester II
10	Laporan Profil Entitas	2	2	Semester I dan Semester II
	Jumlah (5+6+7+8+9+10)	173	173	

a. Pencapaian Keluaran

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018, yaitu:

1. Keluaran LHP Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sesuai RKP 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan LKPD pada 35 entitas prov/kab/kota. Sampai dengan bulan September 2018, seluruh kegiatan pemeriksaan pendahuluan dan terinci pada 35 entitas prov/kab/kota/badan atas LKPD TA 2017 telah dilaksanakan. Anggaran Pemeriksaan LKPD sebesar Rp11.996.433.022,00 telah direalisasikan sebesar Rp11.928.654.073,00 atau sebesar 99,44%. Pada bulan Juli 2018 telah dilaksanakan penyerahan LHP kepada 35 Ketua DPRD dan Kepala Daerah.
- b. Pemeriksaan PDTT sebanyak 51 obyek pemeriksaan (obrik) pada Semester I dan II Tahun 2018. Jumlah tersebut merupakan kegiatan pemeriksaan Banpol dengan target output sebanyak 38 LHP dan pemeriksaan Non Banpol dengan target output sebanyak 13 LHP. Sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan dan penyerahan LHP banpol sebanyak 38 LHP.

Anggaran Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Non Banpol sebesar Rp2.658.977.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.252.294.461,00 atau sebesar 84,71%.

Anggaran Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Banpol sebesar Rp881.291.250,00 telah direalisasikan sebesar Rp881.291.250,00 atau sebesar 100,00%.

c. Pemeriksaan Kinerja sebanyak 13 obrik pada Semester II Tahun 2018. Sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan Pendahuluan Kinerja :

- 1) JKN Kab. Gresik
- 2) Pengadaan Jasa Kab. Sidoarjo
- 3) Dana Desa Kab. Sampang
- 4) Dana Desa Kab. Ponorogo
- 5) Pendidikan Kab. Tuban
- 6) Pengadaan Jasa Kab. Madiun
- 7) Pengadaan Jasa Kota Batu
- 8) Dana Desa Kab Kediri
- 9) Pendidikan Kab. Trenggalek
- 10) Dana Desa Kab. Banyuwangi
- 11) Dana Desa Kab. Probolinggo
- 12) JKN Kab. Pasuruan
- 13) Kinerja Pengadaan Jasa Kab. Jombang

Anggaran Pemeriksaan Kinerja sebesar Rp4.574.201.728,00 telah direalisasikan sebesar Rp4.464.640.999,00 atau sebesar 97,60%.

2. LHP (Laporan Keuangan) Oleh KAP untuk dan atas nama BPK

Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK dilaksanakan pada 4 entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kota Kediri, dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sampai dengan bulan Desember 2018, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan dan terinci pada 4 entitas prov/kab/kota/badan atas LKPD TA 2017. Anggaran LHP Oleh KAP untuk dan atas nama BPK sebesar Rp2.521.165.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.514.416.332,00 atau sebesar 99,73%.

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sebesar

Rp417.324.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp411.168.555,00 atau sebesar 98,53%.

4. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp475.964.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp470.962.010,00 atau sebesar 98,95%.

5. Rumusan Bahan Pendapat

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Rumusan Bahan Pendapat sebesar Rp8.284.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp8.198.300,00 atau sebesar 98,96%.

6. Layanan Administrasi Pemeriksaan

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran keluaran Layanan Administrasi Pemeriksaan sebesar Rp1.521.059.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.486.562.912,00 atau sebesar 97,73%.

7. Sumbangan IHPS

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Sumbangan IHPS sebesar Rp317.256.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp316.931.819,00 atau sebesar 99,90%.

8. Laporan Profil Entitas

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Laporan Profil Entitas sebesar Rp11.140.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp11.125.025,00 atau sebesar 99,87%.

b. Keluaran tidak sesuai RKP

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, belum ada realisasi keluaran yang tidak sesuai dengan RKP.

c. Realisasi Anggaran

Berdasarkan RKP Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp25.043.095.000,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp24.746.245.736,00 atau sebesar 98,81%.

2 RKSP

a. Pencapaian Keluaran

1. Layanan Hukum Perwakilan

Kegiatan pada keluaran ini antara lain:

- a. melaksanakan legislasi atas konsep SK Kepala Perwakilan, melaksanakan penginputan produk hukum yang berupa Perda, Pergub, Perbub dan Perwali pada website peraturan.bpk.go.id, melaksanakan Abstrak Produk Hukum.
- b. melaksanakan pengumpulan Produk Hukum ke Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kab. Bangkalan, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kota Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, dan Kota Pacitan
- c. mengikuti konsinyering Pemaparan dan Pembahasan Penyusunan Panduan Konsultasi Hukum On Site di Jakarta dalam rangka memberikan pendapat hukum terkait pemeriksaan BPK dan permasalahan hukum lainnya
- d. memberikan pendapat hukum atas permintaan salinan LHP Kabupaten Sumenep TA 2017 dari PT Duta Wahana Utama
- e. Melakukan legislasi atas konsep Keputusan Kalan terkait: Tim Inventarisasi dan Penghapusan BMN, Perubahan Tim Pengelola Keuangan, Perubahan Kedua Tim Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, Perubahan Kedua Tim Monitoring Realisasi Kinerja dan Anggaran, Penempatan PNS di lingkungan BPK Prov. Jatim. Legislasi konsep ID Kalan tentang:
 - Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan ke 73
 - Petugas Upacara Bendera Peringatan HUT Kemerdekaan ke 73
- f. Menyusun tulisan hukum dan catatan berita:
 - Penundaan Sanksi Blacklist menurut Hukum Administrasi
 - Gubernur dan Bupati se-Jawa Timur Komitmen Anti Korupsi
 - Memahami penerapan sanksi Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut PP No.16 Tahun 2018
 - Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar pengaturan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional bagi pimpinan DPRD
 - Modus-modus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang & Jasa
- g. Koordinasi dengan Polda Jatim atas permintaan pemeriksaan investigasi dalam kasus tindak pidana korupsi pengembangan budidaya sapi potong paket 5 TA 2016 pada Dinas Peternakan Prov. Jatim
- h. Koordinasi, persiapan dan mengikuti persidangan di PTUN Surabaya
- i. FGD Implementasi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan sanksi daftar hitam, modus-modus persekongkolan dalam

tender pemerintah dan aspek hukum dan resiko gugatan terhadap LHP BPK di kantor Perwakilan Jatim

- j. Menyusun Prognosis Kegiatan Subbag Hukum TA 2020
- k. Menyampaikan Pendapat Hukum atas Proses Tender Pekerjaan Pengadaan dan Perakitan Dermaga Apung pada Dinas Perikanan Kab. Situbondo TA 2018
- l. Mengikuti rapat koordinasi Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Polrestabes Surabaya tanggal 13 Desember 2018
- m. Menyampaikan pendapat hukum mengenai kebijakan penghitungan nilai ketidaksesuaian mutu kuat tekan beton

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Layanan Hukum Perwakilan sebesar Rp541.350.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp524.919.706,00 atau sebesar 96,96%.

1. Layanan Kehumasan Perwakilan

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta di Kantor BPK Perwakilan pada bulan Januari 2018
- b. Menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang di Kantor BPK Perwakilan pada bulan Februari 2018
- c. Melaksanakan media visit ke RRI dan Radio SS serta persiapan go to school ke SMA Al Hikmah dan Al Khodijah di Surabaya
- d. Layanan Administrasi perpustakaan dilaksanakan setiap bulan
- e. Penyusunan kompilasi kliping koran yang berisi berita mengenai BPK dan Keuangan Daerah sebagai data pendukung pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan setiap bulan
- f. Telah dilakukan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat melalui PIK yang dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan kepada PPID
- g. Mengikuti forum perpustakaan di Jakarta
- h. Melakukan kerjasama dengan media pada Harian Kompas, TV One, Metro TV, MNC Group dan Indosiar
- i. Melakukan kerjasama dengan media pada Harian Surya, Republika dan Tribun Jatim
- j. Melakukan kunjungan dan menyampaikan undangan sertijab Kepala Perwakilan ke forkopimda dan Instansi vertikal di Surabaya

- k. Melaksanakan sertijab Kepala Perwakilan
 - l. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kota Mojokerto & Inspektorat dengan Kab. Jombang
 - m. Melaksanakan pendampingan Kaditama Binbangkum dalam rangka kunjungan kerja DPR Komisi XI
 - n. Menyusun Prognosis Kegiatan Subbag Humas TA 2020
 - o. Melaksanakan dialog nasional Program Keluarga Harapan di Malang oleh Anggota 3 BPK
2. Layanan Tata Usaha Perwakilan
- Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:
- a. Menyusun konsep surat dan dokumen lainnya terkait dengan kegiatan Kepala Perwakilan (termasuk surat tugas pemeriksaan di lingkup BPK Perwakilan)
 - b. Melaksanakan tata upacara bendera untuk berbagai tujuan
 - c. Melaksanakan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)
 - d. Melaksanakan kegiatan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
 - e. Menyiapkan dan menganalisis data sesuai kebutuhan Kalan, baik yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal
 - f. Mengumpulkan dan mengkompilasi Laporan Tengah Bulanan dari tiap Eselon III di kantor BPK Perwakilan, serta menyusun konsep Laporan Bulanan s.d bulan Agustus 2018 sesuai arahan Kasubbag TU Kalan
 - g. Melaksanakan pendampingan kegiatan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Anggota I, II, III, IV, V, VI dan Anggota VII BPK

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan sebesar Rp878.717.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp871.936.394,00 atau sebesar 99,23%.

3. Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Layanan administrasi kepegawaian diselenggarakan secara rutin tiap bulan, melaksanakan pengurusan mutasi internal pegawai, penyusunan data pendukung pelaporan SPT Pegawai Tahun 2017, melaksanakan pengurusan penambahan peserta (anggota keluarga baru) BPJS untuk pegawai, melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat pegawai, melakukan koordinasi pelaksanaan MCU

- b. Melaksanakan penyusunan SKP Tahun 2018 & penilaian SKP/PKPP (MAKIN) Tahun 2017 dan untuk pegawai yang mutasi
- c. Melaksanakan konsinyering penilaian angka kredit
- d. Melaksanakan Diklat LKPD untuk Pemeriksa
- e. Melaksanakan sosialisasi pengisian SPT Tahun 2017
- f. Menyusun laporan rekapitulasi absensi bulanan dan pengurusan penurunan pangkat pegawai
- g. Melaksanakan test TPA & TOEFL
- h. Melaksanakan KTF
- i. Survey Piloting ECC
- j. Sosialisasi Mandiri Inhealth
- k. Melaksanakan reuiu MAKIN dan presensi pegawai
- l. Melaksanakan Seminar Psikologi
- m. Melaksanakan pengukuran seragam BPK
- n. Pengajuan usulan penghargaan pegawai
- o. Pengajuan diklat pegawai di Sidoarjo
- p. Peresmian dan Pembukaan ECC (*employee Care Center*)
- q. Menyelenggarakan diklat pemeriksaan infrastruktur
- r. Melaksanakan Diklat Keprotokolan
- s. Menyusun Prognosis Kegiatan Subbag SDM TA 2020
- t. Melaksanakan reuiu hukuman disiplin pegawai dan presensi pegawai
- u. Melaksanakan sosialisasi SISDM
- v. Melaksanakan Tes SKB CPNS 2019

Sampai dengan bulan Desember 2018, anggaran Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan sebesar Rp756.312.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp741.614.647,00 atau sebesar 98,06%.

4. Layanan Keuangan Perwakilan

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Telah melaksanakan penyusunan Prognosis RKP/RKSP Tahun 2019 pada bulan Januari 2018
- b. Melaksanakan pembahasan Prognosis RKP/RKSP Tahun 2019 dengan Biro Keuangan & PSMK
- c. Telah melaksanakan penyusunan RKA Satker berdasarkan pagu indikatif Tahun 2019
- d. Telah melaksanakan revisi ke-2 DIPA
- e. Telah melaksanakan revisi POK ke-3

- f. Telah melaksanakan revisi POK ke-4
- g. Telah melaksanakan penyusunan Prognosis RKP/RKSP Tahun 2020 pada bulan November 2018
- h. Kegiatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan setiap bulan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN
- i. Telah melaksanakan kegiatan konsinyering dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran TW II dan rencana pelaksanaan anggaran TW III dengan mengundang narasumber dari Kanwil DJPB Jawa Timur
- j. Melaksanakan kegiatan konsinyering sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2018 dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran triwulan IV TA 2018 dengan mengundang narasumber dari KPPN Sidoarjo
- k. Telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan DIPA Setjen & DIPA BPK Pusat per 31 Desember 2017, melaksanakan penyusunan Laporan Pemantauan & Realisasi Anggaran periode Agustus 2018 serta BA Rekonsiliasi Realisasi Anggaran periode Desember 2017
- l. Telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2018 BPK Perwakilan Jawa Timur dan Laporan Keuangan Likuidasi DIPA Eselon I BPK Pusat

Sampai dengan bulan Desember 2018, anggaran pada keluaran Layanan Keuangan Perwakilan sebesar Rp922.545.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp919.997.890,00 atau sebesar 99,72%.

5. Layanan Umum Perwakilan

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Kegiatan administrasi pengelolaan persuratan dilaksanakan secara rutin setiap hari
- b. Menyusun Prognosis Kegiatan Subbag Umum & TI TA 2020
- c. Kegiatan pengelolaan teknologi informasi dilaksanakan secara rutin setiap hari, meliputi pemberian layanan TI kepada para pegawai
- d. Telah dilaksanakan penyusunan Laporan BMN Semester II Tahun 2017 & Laporan BMN per 31 Desember 2017, pengadaan KAP Tahun 2018 & Jasa CS Tahun 2018. Beauty contest pengadaan KAP dilaksanakan pada bulan November

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Layanan Umum Perwakilan sebesar Rp427.668.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp406.367.825,00 atau sebesar 95,02%.

6. Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan

Sampai dengan bulan Desember 2018 Telah dilaksanakan kegiatan

- a. layanan pimpinan/tamu & penyusunan Laporan Bulanan Eselon II Periode September 2018
- b. Telah dilakukan pembayaran Honor Tim Publikasi

Sampai dengan bulan November tahun 2018, anggaran pada keluaran Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan sebesar Rp380.920.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp380.545.562,00 atau sebesar 99,90%.

7. Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Telah dilaksanakan pembayaran Gaji bulan Desember tahun 2018, uang makan bulan November dan Desember 2018, kekurangan gaji 2018
- b. Telah dilaksanakan pembayaran Honor PTT bulan November 2018
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan MCU
- d. Melakukan pengadaan obat
- e. Telah dilaksanakan pembayaran Honor Tim bulan November 2018

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia sebesar Rp16.507.398.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp14.938.028.203,00 atau sebesar 90,49%.

8. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah melaksanakan tugas rutin berupa pemberian pelayanan dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Salah satu tugas utama Tim tsb adalah memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari secara akuntabel
- b. Tim SAPP (SAI dan BMN) telah melaksanakan tugas rutin berupa penatausahaan terkait pelaporan atas pelaksanaan anggaran, yaitu pengelolaan aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN serta melaksanakan rekonsiliasi ADK aplikasi tsb dengan Kementerian Keuangan (KPPN, KPKNL & Kanwil DJKN)
- c. Tim Pengurus/Penyimpan BMN telah melaksanakan penatausahaan BMN satker berupa inventarisasi, penyimpanan maupun pendistribusian aset tsb ke unit kerja di kantor perwakilan

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran pada keluaran Layanan Perkantoran Bidang Keuangan sebesar Rp292.320.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp286.820.000,00 atau sebesar 98,12%.

9. Layanan Perkantoran Bidang Umum

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018:

- a. Telah dilaksanakan pemeliharaan atas sarana & prasarana kantor, pembayaran listrik, air dan telepon serta pengiriman surat dan pengadaan kardus KKP.
- b. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan atas tandon air rumah dinas Kepala Perwakilan

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran Layanan Perkantoran Bidang Umum sebesar Rp3.907.774.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp3.776.335.423,00 atau sebesar 96,64%.

2. Keluaran tidak sesuai RKSP

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, belum ada realisasi keluaran yang tidak sesuai dengan RKP.

3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan RKSP Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp24.615.004.000,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp22.846.565.650,00 atau sebesar 92,82%.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini merupakan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Auditorat Keuangan Negara V BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian target kinerja dalam mendukung visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Renstra BPK 2016-2020. Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 adalah sebesar 97,92%. Pencapaian skor IKU selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Nilai IKU tahunan

No	Skor 2015	Skor 2016	Skor 2017	Skor 2018
1	94,07	100,52	100,16	97,92

Skor IKU BPK Perwakilan Jawa Timur menurun jika dibandingkan pencapaian skor tahun 2016 dan 2017. Terdapat skor Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan di tahun 2018, diantaranya:

1. **IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai atas Nilai Dasar BPK**

Indikator Kinerja 3.1.1 mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK, dan diukur untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pegawai BPK terhadap visi misi dan nilai dasar BPK.

Pengukuran IK 3.1.1 baru ditetapkan di 2018 dengan target 5,00 dan telah terealisasi 3,94 dengan skor 78,8. Kesulitan atas pemenuhan IK 3.1.1 adalah pegawai yang tidak mengisi kuisioner dan kecenderungan *surveier* menganggap remeh dalam mengisi kuisioner, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal, namun untuk memaksimalkan pencapaian target IK 3.1.1, BPK Perwakilan Jawa Timur merencanakan untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman visi misi BPK dengan mengundang nara sumber dari Inspektorat Utama dan memaksimalkan pengisian kuisioner oleh pegawai.

2. **IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator Kinerja 3.1.2 mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi.

Pengukuran IK 3.1.2 baru ditetapkan di 2018 dengan target sebesar 5,00 dan telah terealisasi sebesar 4,57 dengan skor 91,4.

Sama seperti IK 3.1.1, kesulitan atas pemenuhan IK 3.1.2 adalah pegawai yang tidak mengisi kuisioner dan kecenderungan surveier menganggap remeh dalam mengisi kuisioner, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Namun untuk memaksimalkan pencapaian target IK 3.1.2, BPK Perwakilan Jawa Timur merencanakan untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugas pokok pegawai di lingkungan BPK Jawa Timur dan memaksimalkan pengisian kuisioner oleh pegawai.

3. **IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Perwakilan) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2017 sesuai Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 295/ND/XI/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai 79,77(BB) dengan kategori sangat baik. Realisasi IK 3.2.1 turun jika dibandingkan pencapaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja selama 3 tahun terakhir, dan belum mencapai target yang ditetapkan di 2020.

BPK Jawa Timur terus berupaya memperbaiki rekomendasi-rekomendasi Itama dalam hasil evaluasi SIMAK.

4. **IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran**

Tingkat kinerja atas aspek implementasi anggaran berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari empat indikator, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator 3.4.1 diukur untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada tahun 2018 IK 3.1.4 terealisasi sebesar 73,78% dari target sebesar 85% dan mendapatkan skor 80. BPK Jawa Timur terus berupaya mendorong peningkatan kinerja implementasi anggaran terutama dengan menjaga aspek konsistensi Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari s.d Desember. Hambatan yang dialami perwakilan Jawa Timur adalah, terdapat kondisi dimana rencana penarikan anggaran lebih besar/ lebih kecil dibandingkan dengan realisasi anggaran per bulan.

Untuk IKU yang telah mencapai atau bahkan melampaui targetnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan berusaha untuk mempertahankannya agar tetap mencapai target yang telah dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

Kami berharap penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK maupun untuk para pemegang kepentingan di luar BPK lainnya.

Lampiran

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2018
SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2018
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

Realisasi Capaian Iku Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2018	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016
Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan						
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	72,63%	70,97%	66,12%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%		
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara			100%	101%
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli			100%	103%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	95%	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	20%	21,05%	22,39%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%		
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	78	78
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	90%	90%		76%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,42	4,33	4,24
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	97,17%
	IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%
Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi						
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5	3,94		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2018	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016
Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan						
Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4,57		
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,55%	100%	
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB	A	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,01%	74,54%	90,74%
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1	1	1	0
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	0	0
	IK 3.2.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	100%
	IK 3.2.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	89,89%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	6,5	4,7	4,2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	92,21%	83,33%
	IK 3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	90,54%	95,45%
Keuangan						
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	85%	73,78%	86,18%	93,54%

Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	61%	62%	63%	64%	72,63%	113,48%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	1	100,00%
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	90%	95%	90%	90,00%	100,00%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	15%	17%	20%	23%	25%	20,00%	80,00%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP			90%		90%	90,00%	100,00%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	78	78	78	78	100,00%
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%		
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,42	110,50%
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK			5		5	3,94	78,80%
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK			5		5	4,57	91,40%
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin			100%		100%	99,55%	99,55%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	A	BB	79,77%
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	85%	90%	95%	100%	98%	98,01%
IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	0	1	1	1	1	1	100,00%
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	0%	60%	70%	85%	100%	100%	100,00%
IK 3.2.5	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 3.2.5	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	89%	89%	89%	89%	89%	90%	101,12%

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 5 (Lima) Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi Tahun 2018 dibanding Target Kinerja Tahun 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	6,5	325,00%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90%	90%	90%	90%	90%	100%	111,11%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	83%	85%	87%	90%	73,78%	81,98%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2018		%
			Target	Realisasi	
1	2		3	4	$5 = 4/3 * 100$
SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	72,63%	104%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100%
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	100%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	20%	100%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	100%
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,42	108%
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan dinyatakan Menang	100%	100%	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	3,94	79%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2018		%
dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,57	91%
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,55%	99,55%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	79,77%
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,01%	123%
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1	1	100%
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	100%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	6,5	217%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	73,78%	87%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : **Rp49,658,099,000.00**
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : **Rp47,592,811,386.00**